

ABSTRACT

Studies on the correlation between fiscal policy and income inequality remain open as to whether local government expenditure has a redistributive effect on income. This study attempts to contribute to this debate by integrating spatial analysis to examine the effects of five fiscal policy instruments on income inequality. This study used a district-level panel data set of 13 districts in South Kalimantan Province between 2010 and 2020.

The exploratory spatial data analysis (ESDA) found a positive and significant spatial dependency on local tax revenue throughout the observed period and the Gini coefficient in a specific year. This study also highlights a significant high-income inequality cluster and a high-local tax revenue cluster located in the most urbanized area in South Kalimantan Province using Local Indicator Spatial Analysis (LISA). The panel data regression illuminates policy instruments on expenditure worked better to enhance income distribution rather than the redistributive function in the local tax system.

Government spending on health positively improved the income share of the poor, while that on housing and public facilities significantly exacerbated the income gap. Although public expenditure on education and social protection did not show a significant effect on income distribution, government spending on the latter had a robust effect on poverty reduction. Moreover, local tax revenue still did not play a pertinent role in alleviating income inequality.

Keywords: local government spending; local tax revenue; income inequality; spatial analysis; South Kalimantan

INTISARI

Studi tentang korelasi antara kebijakan fiskal dan ketimpangan pendapatan masih terbuka mengenai apakah pengeluaran pemerintah daerah memiliki efek redistributif terhadap pendapatan. Studi ini memberikan upaya untuk berkontribusi pada perdebatan ini dengan mengintegrasikan analisis spasial untuk menguji pengaruh lima instrumen kebijakan fiskal terhadap ketimpangan pendapatan. Studi ini menggunakan kumpulan data panel tingkat kabupaten dari 13 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan antara tahun 2010 dan 2020.

Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA) menemukan ketergantungan spasial yang positif dan signifikan terhadap pendapatan pajak daerah selama periode waktu yang diamati dan pada Koefisien Gini pada tahun tertentu. Studi ini juga menyoroti kluster ketimpangan pendapatan tinggi yang signifikan dan kluster penerimaan pajak daerah yang tinggi yang terletak di daerah paling urban di Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan *Local Indicator Spatial Analysis (LISA)*. Menggambar dari regresi data panel, studi ini menjelaskan instrumen kebijakan pengeluaran bekerja lebih baik untuk meningkatkan distribusi pendapatan daripada fungsi redistributif dalam sistem pajak daerah.

Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan secara positif meningkatkan bagian pendapatan masyarakat miskin, sementara pengeluaran untuk perumahan dan fasilitas umum secara signifikan memperburuk kesenjangan pendapatan. Meskipun pengeluaran publik untuk pendidikan dan perlindungan sosial tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap distribusi pendapatan, namun pengeluaran pemerintah untuk yang terakhir memiliki pengaruh yang kuat terhadap pengurangan kemiskinan. Selain itu, penerimaan pajak daerah masih belum berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Kata kunci: belanja pemerintah daerah; penerimaan pajak daerah; ketimpangan pendapatan; Analisis spasial; Kalimantan Selatan